

Studi Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih Di Kelurahan Singotrunan Dalam Pilkada Tahun 2024

¹Adni Maulida Fauzi, ²Andika Ronggo Gumuruh, ³Harjianto

Program Studi Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Banyuwangi

e-mail: adnimaulida11@gmail.com, andikaronggo@gmail.com, hr.bwin@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Singotrunan dalam Pilkada Tahun 2024. Partisipasi pemilih merupakan indikator penting dalam kualitas demokrasi, namun data menunjukkan bahwa hanya sekitar 54,58% pemilih yang menggunakan hak pilihnya, menurun drastis dari Pilkada sebelumnya yang mencapai 82%. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, untuk menggali pengalaman dan perspektif masyarakat terkait dengan keputusan mereka dalam berpartisipasi atau tidak dalam pemilu. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pemahaman politik, apatisme, serta kekecewaan terhadap pemimpin sebelumnya. Sementara itu, faktor eksternal mencakup minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, kesibukan pekerjaan, dan keterbatasan akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pendidikan politik, strategi sosialisasi yang lebih efektif, serta peran aktif tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran politik warga. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, KPU, dan pihak terkait dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi pemilih di masa mendatang.

Kata Kunci: Partisipasi Pemilih, Pilkada 2024, Kelurahan Singotrunan, Politik, Fenomenologi

Abstract

This study aims to identify and analyze the factors causing the low voter turnout in Singotrunan Subdistrict during the 2024 Regional Head Election (Pilkada). Voter participation is a crucial indicator of democratic quality; however, data shows that only about 54.58% of eligible voters exercised their voting rights, a significant decrease from the 82% recorded in the previous Pilkada. This research employed a qualitative approach with a phenomenological method to explore the experiences and perspectives of residents regarding their decision to participate or abstain from voting. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal two main categories of influencing factors: internal and external. Internal factors include lack of political awareness, political apathy, and disappointment with previous leaders. External factors involve limited electoral outreach, work-related time constraints, and restricted access to polling stations. The study recommends enhancing political education, implementing more effective voter outreach strategies, and involving community leaders to raise political awareness. These findings are expected to provide valuable insights for local governments, the General Election Commission (KPU), and relevant stakeholders in developing strategies to increase voter participation in future elections.

Keywords: Voter Participation, 2024 Regional Election, Singotrunan Subdistrict, Politics, Phenomenology



This work is licensed [under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu bagian penting dalam sistem demokrasi sebuah negara. Putri Yunita Sari & Siti Tiara Maulia (2024:137-142) Melalui

Pemilu, rakyat menyalurkan hak pilih untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi juga sangat bergantung pada peran serta rakyat, sebagaimana dikatakan bahwa demokrasi adalah "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat." Sarbaini (2015: 107) Melalui pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih pasangan calon atau kandidat yang akan menjabat sebagai pejabat eksekutif. Pejabat yang terpilih ini nantinya akan mempengaruhi kebijakan dan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, pemilu merupakan manifestasi terbesar dari partisipasi rakyat dalam proses demokrasi.

Menurut Wahid (2017: 45) Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi mekanisme mendasar dalam sistem demokrasi yang memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Proses ini membuka jalan bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan negara dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai demokratis. Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu pertama terjadi pada tahun 1955. Peristiwa tersebut tercatat sebagai salah satu momen paling demokratis dan transparan dalam sejarah perjalanan politik bangsa. Melalui Pemilu ini, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya secara luas terlibat dalam proses pemilihan wakil secara langsung. Pada saat itu, lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus kelompok serta calon perseorangan berpartisipasi, mencerminkan antusiasme masyarakat dalam proses demokrasi. Sebagaimana dicatat oleh Anwar (2015: 88) Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, yaitu pada tahun 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada tahun 2024, Indonesia melaksanakan Pilkada serentak nasional pertama, di mana pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota diadakan secara bersamaan pada 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum (2024) menyatakan Pilkada ini mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, menandai langkah penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Namun, pelaksanaan Pilkada serentak nasional juga menghadapi tantangan, termasuk isu penunjukan penjabat kepala daerah dan perdebatan mengenai efektivitas sistem pemilihan langsung. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa dominasi koalisi pemerintah dalam Pilkada dapat mengurangi kompetisi politik dan mempersempit pilihan bagi pemilih.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang memiliki latar belakang historis yang panjang. Saat ini, Banyuwangi terdiri atas 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa (BPS Banyuwangi, 2024). Kecamatan Banyuwangi berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan sekaligus sebagai jantung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2024) Kabupaten Banyuwangi menetapkan terdapat 2732 TPS dari 25 Kecamatan. Kecamatan Banyuwangi terdapat 172 TPS dari 18 Kelurahan, Sedangkan Kelurahan Singotrunan terdapat 13 TPS. Berdasarkan data dari PPS Singotrunan Partisipasi pemilih di kelurahan singotrunan yang ikut berpartisipasi dalam pilkada 2024 hanya dapat setengah dari jumlah DPT yaitu 54,58% dan yang tidak berpartisipasi 45,42%, bandingan pilkada 2020 yang menyentuh angka 82% Artinya tingkat partisipasi pemilih di kelurahan singotrunan sangat rendah dalam menyalurkan suaranya. Perlu upaya meningkatkan kesadaran perilaku politik dalam kampanye masyarakat agar tidak bersikap apatis dan pragmatis sehingga terhindar dari isu sara dan hoaks yang menjadi masalah ditengah banyaknya informasi saat ini.

Kelurahan Singotrunan yang terletak pada Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan daerah pemilihan untuk Pilkada 2024, melihat penurunan partisipasi pemilih. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang penyebab partisipasi pemilih yang rendah di desa tersebut. Hasil Observasi pada tanggal 27 November 2024 yang telah peneliti lakukan

bahwa masih banyak pemilih yang tidak ikut berpartisipasi dalam pilkada 2025 dari DPT Kelurahan Singotrunan sebesar 6.743 jiwa sedangkan yang berpartisipasi untuk kategori Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur sebanyak 3.520 sedangkan Bupati dan Wakil bupati sebanyak 3.682 bisa di simpulkan bahwa masih ada setengah pemilih yang tidak ikut berpartisipasi dalam pilkada.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Studi Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih Di Kelurahan Singotrunan Dalam Pilkada Tahun 2024”

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengenai studi identifikasi mengenai tingkat partisipasi pemilih pilkada tahun 2024, yang sebelumnya juga telah diteliti oleh beberapa peneliti lain dengan pendekatan dan fokus yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh : Hendrik dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa Peruandalam Kecamatan Tayan Hulu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Desa Peruandalam, Kecamatan Tayan Hulu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018. yaitu penelitian ini di lakukan di lokasi berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gading Rejo Dan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Singotrunan Kabupaten Banyuwangi. Dan juga penelitian ini berfokus pada pemilihan pilgub atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur sedangkan penelitian penelitian berfokus pada dua kategori yaitu pemilihan pilbub dan pilgub.

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Junius Saputra dengan judul Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Desa BojongIndah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor Pada Pilpres 2019. Tujuan dari penelien ini untuk mendeskrisikan bagaimana masyarakat desa bojong indah menggunakan hak pilihnya dan mengetahui faktor partisipasi politik masyarakat. penelitian ini berfokus pada pilpres atau pemilihan presiden sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pilkada 2025, dan penelitian ini juga dilakukan di lokasi berbeda yaitu di Desa BojongIndah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor sedangkan peneliti dilakukan di Desa Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudini Aspirant dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapan. Tujuan penelitian ini berawal dari sebuah pandangan tentang rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak suara pilih pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. penelitian ini berfokus pada partisipasi politik dalam pemilihan umum di wilayah tertentu sedangkan penelitian peneliti spesifik pada partisipasi pemilih di Kelurahan Singotrunan dalam Pilkada 2025.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh : Eggi Ginanjar , Bambang Darmawan , Sriyono dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Belajar Peserta Didik Smk. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi rendahnya partisipasi belajar peserta didik di SMK penelitian ini berfokus pada rendahnya partisipasi belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi, yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan proses belajar-mengajar. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada redahnya partisipasi pada pilkada

Studi Identifikasi merupakan suatu rencana yang terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan yang menurut Poerwadarminto(2005:365) menyatakan bahwa identifikasi adalah proses untuk menentukan atau menetapkan identitas seseorang maupun suatu benda. Dalam perspektif psikoanalisis, identifikasi dipandang sebagai tahapan psikologis di mana individu secara tidak langsung mengadopsi seluruh atau sebagian karakteristik dari tokoh tertentu, yang didasari oleh keterikatan emosional terhadap tokoh tersebut

Partisipasi politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi warga negara untuk turut serta memengaruhi arah kebijakan publik dan keputusan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan masyarakat. Secara umum, partisipasi politik tidak terbatas pada kegiatan pemilihan umum saja, namun mencakup seluruh aktivitas warga negara yang memiliki tujuan untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik oleh pemerintah.

Sedangkan Partisipasi pemilih merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, karena mencerminkan tingkat keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi pemilih adalah tindakan warga negara yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon legislatif, kepala daerah, atau presiden. Kegiatan ini tidak hanya mencerminkan partisipasi formal, tetapi juga menunjukkan legitimasi terhadap sistem politik yang berlaku

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum secara umum disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu aspek geografis, aspek psikologis, aspek ekonomi, aspek kepercayaan terhadap pemerintah, serta efektivitas sosialisasi politik. Dari kelima penelitian terdahulu yang telah dikaji, penelitian-penelitian terdahulu ini memiliki beberapa kesamaan dalam hal metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif serta fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu mengidentifikasi faktor rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2025 di Kelurahan Singotrunan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi partisipasi pemilih di tingkat lokal serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menerapkan Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti berupaya untuk menangkap esensi dari pengalaman yang dirasakan oleh individu secara langsung. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Singotrunan dalam kurun waktu selama 5 bulan. Informan pada penelitian ini yaitu masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Perangkat Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan tradisi puter kayu. Wawancara merupakan teknik yang digunakan sebagai metode pengumpulan data melalui tanya jawab antara peneliti dan informan. Kemudian, Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kedua teknik sebelumnya.

Peneliti menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Dengan pengumpulan data kemudian Reduksi data merupakan tahap

pemilahan, merangkum, memusatkan perhatian pada hal-hal utama, setelah itu melakukan Penyajian data sebagai penyusunan informasi oleh peneliti dalam bentuk narasi tertulis, tahap akhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Seluruh proses analisis data dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Temuan dan Pembahasan

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilu di Kelurahan Singotrunan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, peneliti mengidentifikasi penyebab utama minimnya keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika partisipasi politik di tingkat lokal dan kontribusi bagi perbaikan kebijakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral.

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kelurahan Singotrunan teridentifikasi masih berada pada kategori rendah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sejumlah warga dan penyelenggara pemilu, peneliti menemukan lima faktor utama yang secara signifikan memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi tersebut. Kelima faktor tersebut meliputi munculnya sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap proses politik, kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dan distribusi informasi, tekanan kondisi sosial ekonomi, kendala aksesibilitas menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta tidak adanya calon kepala daerah yang dianggap layak dan mewakili aspirasi masyarakat.

Apabila dianalisis lebih lanjut dengan merujuk pada teori dan hasil penelitian sebelumnya, temuan ini selaras dengan gagasan yang dikemukakan oleh Verba, Nie, dan Kim (1978), yang menyatakan bahwa partisipasi politik sangat bergantung pada tiga elemen utama, yaitu sumber daya (resources), keterlibatan psikologis (psychological engagement), dan pemahaman politik (political awareness). Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2021:45) juga menunjukkan bahwa tingkat apatisme serta ketidakpercayaan terhadap para calon merupakan salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih dalam konteks pemilu lokal. Selain itu, studi oleh Utami (2019:62) menggarisbawahi bahwa intensitas dan kualitas sosialisasi sangat memengaruhi keterlibatan pemilih, khususnya di kalangan pemuda dan pemilih pemula. Sementara itu, Nugroho (2022:71) menambahkan bahwa hambatan teknis seperti jauhnya jarak TPS turut memengaruhi partisipasi politik, terutama bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena rendahnya partisipasi pemilih di Kelurahan Singotrunan mencerminkan adanya permasalahan sistemik dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Rendahnya tingkat keterlibatan pemilih tidak sepenuhnya mencerminkan ketidakpedulian individu terhadap politik, melainkan merupakan akibat dari tidak terpenuhinya unsur-unsur penting seperti kepercayaan terhadap proses politik, kemudahan akses informasi dan lokasi, serta representasi calon yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

a. Sikap Apatitis dan Ketidakpercayaan terhadap Proses Politik

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Singotrunan pada Pilkada tahun 2024 adalah sikap apatis masyarakat serta ketidakpercayaan terhadap proses politik. Temuan ini teridentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga. Interpretasi terhadap kondisi ini menunjukkan bahwa

sikap apatis bukan semata-mata cerminan dari rendahnya kesadaran politik individu, melainkan merupakan bentuk resistensi atau kekecewaan kolektif terhadap sistem politik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Temuan ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Verba, Nie, dan Kim (1978), yang menyatakan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yakni sumber daya (resources), keterlibatan psikologis (psychological engagement), dan pemahaman politik (political awareness). Apabila keterlibatan psikologis masyarakat terhadap sistem politik melemah karena kekecewaan atau ketidakpercayaan, maka partisipasi mereka pun akan menurun secara drastis.

Hal ini juga didukung oleh temuan Pratama (2021:45) yang menjelaskan bahwa apatisme politik dan krisis kepercayaan terhadap elite politik merupakan penyebab utama rendahnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah di wilayah perkotaan. Sementara itu, Sari (2020:37) mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat yang menganggap pemilu sebagai ajang formalitas kekuasaan juga menjadi penyumbang besar terhadap rendahnya partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan demikian, diperlukan upaya strategis untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui peningkatan akuntabilitas politik, transparansi kinerja calon terpilih, serta penyediaan ruang komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan masyarakat.

b. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi Pemilu dari Penyelenggara

Aspek lain yang turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi pemilih di Kelurahan Singotrunan adalah terbatasnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pelaksanaan Pilkada, terutama terkait profil, visi, dan misi para calon kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara, banyak informan mengungkapkan bahwa mereka hanya mengenal calon secara sepintas melalui media visual pasif seperti spanduk, poster, atau cerita dari anggota keluarga.

Interpretasi dari temuan ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam strategi komunikasi politik yang digunakan dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Singotrunan. Minimnya intervensi komunikasi dari penyelenggara baik melalui forum tatap muka, media sosial yang interaktif, atau kegiatan edukatif lainnya mengakibatkan masyarakat merasa terputus dari proses politik yang sedang berlangsung.

Temuan ini didukung oleh teori partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel (1977), yang menyatakan bahwa partisipasi dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang memiliki akses terhadap informasi politik yang relevan. Selain itu, Utami (2019:62) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa rendahnya intensitas sosialisasi sangat berkorelasi dengan menurunnya tingkat partisipasi pemilih pemula. Penelitian tersebut menekankan bahwa media sosial dan pendekatan berbasis komunitas lebih efektif dalam menjangkau generasi muda dibanding metode konvensional seperti baliho atau pamflet. Sementara itu, Pratama (2021:47) juga menyatakan bahwa kurangnya pemahaman terhadap program kerja calon menjadi salah satu alasan utama masyarakat memilih untuk golput.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minimnya sosialisasi dan akses terhadap informasi politik menjadi faktor penghambat signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Kelemahan dalam penyampaian informasi menyebabkan masyarakat tidak merasa cukup memiliki pengetahuan atau ketertarikan untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

c. Faktor Sosial Ekonomi yang Menghambat Keikutsertaan

Faktor lain yang turut memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Singotrunan adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama mereka yang bekerja di

sektor informal dan mengandalkan penghasilan harian. Berdasarkan hasil wawancara, informan mengungkapkan mereka memilih tetap bekerja pada hari pemungutan suara karena absennya pemasukan sehari saja dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Pilkada yang dilaksanakan pada hari kerja dinilai tidak memberikan keleluasaan waktu bagi sebagian besar buruh harian untuk menggunakan hak pilihnya, terutama karena kekhawatiran kehilangan pendapatan.

Interpretasi dari temuan ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang tidak memberikan ruang atau fleksibilitas kepada kelompok ekonomi lemah justru menciptakan eksklusif partisipatif. Dalam demokrasi partisipatif yang ideal, negara seharusnya mampu menjamin bahwa seluruh warga, termasuk yang berada dalam tekanan ekonomi, tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus mengorbankan penghasilan hariannya. Ketika tidak tersedia alternatif seperti libur kerja, pemungutan suara di tempat kerja, atau penjadwalan ulang kegiatan ekonomi, maka partisipasi politik menjadi beban, bukan hak yang membebaskan.

Temuan ini selaras dengan pandangan Verba dan Nie (1972), yang menyatakan bahwa partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan resources atau sumber daya, termasuk waktu dan kondisi ekonomi. Semakin terbatas sumber daya yang dimiliki, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan politik. Selain itu, penelitian oleh Fitriani (2020:59) menyebutkan bahwa buruh informal dan pekerja harian lepas merupakan kelompok paling rentan mengalami hambatan dalam menggunakan hak pilih akibat ketiadaan jaminan waktu atau dukungan dari lingkungan kerja. Penelitian lain oleh Hasanah (2022:73) juga menunjukkan bahwa tidak adanya insentif partisipasi atau perlindungan ekonomi selama hari pemilu turut menyebabkan golput struktural, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan ekonomi merupakan faktor struktural yang signifikan dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Ketika sistem pemilu tidak dirancang secara inklusif dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat, maka sebagian kelompok masyarakat akan cenderung absen dari proses demokrasi.

d. Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang Tidak Merata

Salah satu faktor teknis yang turut memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih di Kelurahan Singotrunan pada Pilkada 2024 adalah keterbatasan aksesibilitas terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Interpretasi dari kondisi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa keterbatasan fisik atau geografis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk menyalurkan hak pilihnya. Temuan ini diperkuat oleh kajian Nugroho (2022:71) yang menyatakan bahwa akses fisik ke TPS merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan partisipasi pemilih, terutama bagi kelompok marginal. Dalam penelitiannya, ia menunjukkan bahwa pengurangan jumlah TPS dan minimnya intervensi pelayanan terhadap lansia berdampak langsung pada penurunan partisipasi di daerah urban padat penduduk. Selain itu, Fatmawati (2020:64) menegaskan bahwa sistem pemilu yang baik harus menyediakan fasilitas ramah disabilitas dan lansia, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak politik warga negara dalam demokrasi partisipatif.

Berdasarkan keseluruhan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas teknis ke TPS bukan sekadar persoalan logistik, tetapi menyangkut prinsip dasar dalam demokrasi, yaitu kesetaraan dan inklusivitas. Ketika pemilih mengalami hambatan fisik menuju TPS tanpa adanya kebijakan kompensasi atau bantuan, maka partisipasi politik

menjadi tidak merata. Oleh sebab itu, penyelenggara pemilu perlu mempertimbangkan faktor geografis, demografis, dan sosial dalam penentuan lokasi serta jumlah TPS,

e. Ketiadaan Kandidat yang Menarik dan Representatif

Faktor signifikan lainnya yang turut memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Kelurahan Singotrunan adalah ketiadaan figur calon yang dinilai layak dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Interpretasi dari temuan ini menunjukkan adanya krisis representasi dalam proses demokrasi lokal. Ketika masyarakat merasa tidak ada tokoh yang benar-benar mewakili aspirasi mereka, maka demokrasi kehilangan makna substantifnya. Ketiadaan figur yang dapat dijadikan panutan atau tempat menggantungkan harapan mengindikasikan lemahnya sistem kaderisasi politik.

Temuan ini sejalan dengan teori representasi politik yang dikemukakan oleh Pitkin (1967), yang menekankan pentingnya representasi substantif, yaitu kondisi di mana wakil rakyat benar-benar memahami dan memperjuangkan kepentingan konstituennya. Ketika representasi hanya bersifat formal dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat, maka kepercayaan terhadap proses politik akan melemah. Selain itu, penelitian oleh Prasetyo (2020:58) mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama golput adalah ketidakpercayaan terhadap kandidat yang maju, karena dianggap tidak memiliki rekam jejak, komitmen, ataupun keterhubungan yang jelas dengan kebutuhan publik. Penelitian lain oleh Amelia (2021:67) juga menunjukkan bahwa lemahnya proses kaderisasi dalam tubuh partai politik menyebabkan stagnasi figur, di mana calon yang muncul bukanlah hasil dari meritokrasi, melainkan pertimbangan politis dan ekonomi belaka.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan figur calon yang dianggap layak oleh masyarakat merupakan bentuk nyata dari krisis kepemimpinan lokal. Masyarakat yang tidak menemukan representasi aspiratif dalam pilihan calon cenderung menarik diri dari partisipasi, karena merasa bahwa suara mereka tidak akan menghasilkan perubahan.

2. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pentingnya Pilkada

Peneliti melakukan wawancara terhadap sembilan informan di Kelurahan Singotrunan yang tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada 2024. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pemilu 2024 masih tergolong rendah dan belum merata. Untuk memperjelas temuan tersebut, pembahasan ini akan dikelompokkan dalam beberapa subbab berdasarkan karakteristik respons informan.

a. Kesadaran Normatif tapi Rendahnya Kepercayaan Politik. Para informan menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya Pemilu 2024 sebagai sarana demokrasi untuk memilih pemimpin yang menentukan arah kebijakan. Namun, kekecewaan terhadap pemimpin sebelumnya yang tidak menepati janji membuatnya kehilangan kepercayaan dan memutuskan untuk tidak memilih. Ini mencerminkan kesadaran politik yang baik, namun tidak disertai kepercayaan terhadap sistem politik. Menurut McClosky (1968), rendahnya external efficacy atau keyakinan bahwa sistem politik merespons rakyat, berkontribusi terhadap sikap apatis.

b. Minimnya Literasi Politik pada Pemilih Muda. Dalam data yang di dapatkan melalui informan, Mereka hanya memahami Pilkada sebagai kegiatan mencoblos calon bupati, tanpa mengaitkannya dengan kebijakan publik atau pembangunan. Hal ini menunjukkan lemahnya literasi politik. Verba dan Nie (1972) menegaskan bahwa

pemahaman terhadap proses politik merupakan salah satu modal utama dalam partisipasi politik.

- c. **Apatisme dan Sinisme Politik karena Pengalaman Negatif.** Data yang di dapatkan dari para informan tentang Pandangan ini menunjukkan adanya sinisme politik yang dalam. Selain itu, faktor usia dan kesehatan juga menghambat kehadiran mereka di TPS. McClosky (1968) menjelaskan bahwa sinisme politik yang tinggi mengakibatkan rendahnya partisipasi karena individu merasa suara mereka tidak berdampak.
- d. **Kurangnya Informasi dan Sosialisasi Politik.** Para Informan menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai waktu, tempat, dan calon yang bertarung dalam Pilkada. AG juga menambahkan bahwa tidak ada sosialisasi langsung dari penyelenggara pemilu. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penetrasi sosialisasi politik ke kelompok rentan. Verba dan Nie (1972) menyatakan bahwa paparan informasi politik sangat memengaruhi keterlibatan politik masyarakat.
- e. **Faktor Ekonomi dan Struktural sebagai Hambatan.** Data yang di dapatkan dari para informan melalui wawancara tentang faktor ekonomi yang jauh lebih penting daripada datang ke TPS. Hal ini diungkapkan oleh Surbakti (1992) menyebutkan bahwa kebutuhan ekonomi dan hambatan struktural seperti akses TPS dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik warga.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pemilu di Kelurahan Singotrunan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam bentuk partisipasi aktif. Meskipun sebagian warga memiliki kesadaran normatif tentang pentingnya pemilu, banyak yang terhambat oleh faktor-faktor psikologis (apatisme dan sinisme), struktural (akses dan sosialisasi), serta ekonomi (prioritas pekerjaan). Teori dari Verba dan Nie (1972) menunjukkan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh motivasi, sumber daya, dan kesempatan. Dalam konteks ini, motivasi saja tidak cukup tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang kondusif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriani (2019) dan Yuliani (2020), yang menyatakan bahwa persepsi terhadap calon dan efektivitas pemilu sangat menentukan keputusan pemilih. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi harus mencakup pendekatan edukatif, struktural, dan kultural untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan diatas berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Singotrunan mengenai rendahnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah masih tergolong rendah dan memprihatinkan. Fenomena ini tidak muncul karena satu penyebab tunggal, melainkan merupakan akibat dari keterkaitan berbagai faktor yang saling memengaruhi, meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, struktural, serta dinamika politik lokal.

Dari hasil penelitian ini di peroleh ada lima faktor yakni:

1. **Faktor psikologis dan apatisme politik**, yang muncul karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas suara mereka dalam membawa perubahan nyata di tingkat lokal.

2. **Kurangnya informasi dan lemahnya kegiatan sosialisasi**, yang menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap calon kepala daerah maupun visi-misi yang mereka usung.
3. **Kondisi sosial dan ekonomi**, khususnya bagi pekerja sektor informal yang cenderung mengutamakan pekerjaan harian dibandingkan menyalurkan hak pilihnya.
4. **Terbatasnya akses menuju TPS akibat pengurangan jumlah TPS**, yang menyulitkan kelompok rentan seperti lansia atau warga dengan hambatan mobilitas.
5. **Kekecewaan terhadap calon yang tersedia**, karena dianggap tidak mewakili kebutuhan serta aspirasi masyarakat kecil, sehingga memicu sikap pasif.

Di samping itu, tingkat pemahaman masyarakat terkait urgensi PemiluKada dalam pembangunan daerah juga masih beragam dan cenderung rendah. Banyak warga yang belum memahami nilai strategis pemilihan kepala daerah sebagai instrumen demokrasi yang substansial. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di tingkat lokal belum sepenuhnya beranjak dari tataran prosedural menuju demokrasi yang substantif.

Jika ditinjau melalui pendekatan studi identifikasi dan dikaitkan dengan teori demokrasi partisipatif, maka rendahnya partisipasi ini mencerminkan masih lemahnya kultur demokrasi warga. Hal ini ditandai oleh minimnya kesadaran politik, keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai, serta belum optimalnya pendidikan politik yang bersifat inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Referensi :

- [1]. Anwar, M. (2015). *Demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman yang dikutip: hlm. 88–90.
- [2]. Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Pemilih Pemula dalam Pemilu*. Jakarta: BPS.
- [3]. Fatmawati. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [4]. Fitriani, A. (2019). Persepsi Pemilih Terhadap Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 114–122
- [5]. Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press
- [6]. Hasanah, L. (2022). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu di Daerah Tertinggal*. Yogyakarta: Deepublish.
- [7]. Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Laporan Akhir Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024*. Diakses dari <https://www.kpu.go.id> (diakses 26 Juni 2025)
- [8]. McClosky, H. (1968). Political Participation. In D. L. Sills (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences* (Vol. 12). Macmillan
- [9]. Nugroho, A. (2022). Hambatan Teknis dalam Partisipasi Politik: Studi Kasus Jarak Tempuh TPS terhadap Kelompok Rentan. *Jurnal Demokrasi dan Kewarganegaraan*, 10(1), 69–78.
- [10]. Nurhayati, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 23–35.
- [11]. Pratama, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 13(3), 71–84. Diakses dari <https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmmba/article/view/1955>
- [12]. Putri, Y. S., & Maulia, S. T. (2024). *Demokrasi dan pemilu di era digital: Partisipasi masyarakat dalam sistem politik modern*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman yang dikutip: hlm. 137–142.

- [13]. Sarbaini. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan masyarakat madani*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman yang dikutip: hlm. 107.
- [14]. Sari, (2020). Persepsi Masyarakat tentang Pemilu sebagai Formalitas Kekuasaan dan Dampaknya terhadap Partisipasi Pemilih. *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*, 20(5), 37–45.
- [15]. Utami, R. (2019). Pengaruh Intensitas dan Kualitas Sosialisasi Politik terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(2), 60–70.
- [16]. Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row. hlm. 3–4.
- [17]. Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (2021). *Voice and Equality: Civic Voluntarism*.
- [18]. Wahid, A. (2017). *Pemilu dan demokrasi di Indonesia: Sejarah, dinamika, dan prospek*. Bandung: Alfabeta. hlm. 45
- [19]. Yuliani, D. (2020). Ketidakpercayaan Terhadap Calon Kepala Daerah sebagai Faktor Golput. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 8(1), 45–53.